

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Hakim Nusantara dan Nasroen Jasabaru, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1980)
- Agustina, N., & Pramana, S, Kay, *Determinants of Information and Communications Technology (ICT) Development in Indonesia at 2012-2015*, (Proceedings Book: 2018)
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan/atau Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Badan Pusat Statistik, *Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2022 (Hasil Kegiatan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area)*, (Badan Pusat Statistik, 2022)
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Cetakan Ke-11, (Jakarta: LP3ES, 1987)
- E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994)

Ida Bagus RahmadiSupanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006)

Imam Mahdi dan Iskandar Zulkarnain Oktaria, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: IPB Press, 2013)

Jan M. Otto dalam Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Jimly Asshiddiqie, “Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer”, Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012)

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005)

Julius Adams S, Loretta H. Mannix, *Mind and Hand: The Birth of MIT*, (Cambridge: MIT Press, 2005)

KPPOD Brief, “Implementasi OSS RBA di Daerah (Tantangan dan Kebutuhan Pemda)”, (Jakarta: Kompas, Edisi Oktober-Desember 2021)

- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (In Leiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht)*, diterjemahkan Oetarid Sadino, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015)
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2019)
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B. Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Hidup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000)
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1976)
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 1999)
- Mudrajad Kuncoro, *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010)
- Muhammad Bobby, *Sertifikat Elektronik Sebagai Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia Perspektif Teori Kepastian Hukum dan Maqasid Syariah*, (Bogor: Guepedia, 2022)
- Nugroho, A., Riswandy, et.all., *Teknologi dan Informasi Di Masa Pandemi COVID-19*, (Jakarta: Senamika, 2020)

O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970)

Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984)

Parjudi Atmosoedirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-9, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

Philippus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

Philippus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-2 (Yogyakarta: UII Press 2003)

Ridwan Halim, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003)

- Safri Nugraha, *Lapisan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2007)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum. Cetakan Keenam*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)
- Sjahran Basa, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, (Bandung: Armico, 1985)
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1999)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Sri Pudiyatmo, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Bandung: Rezki Press, 2007)
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Suparto Wijoyo, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005)
- United Nations Development Programme, *“Governance for Sustainable Human Development”*, (New York: Management Development and Governance Division, 1997)

Journal International/Jurnal Nasional:

Anandhita, V. H. (2017), “*Analisis Ekosistem TIK Indonesia yang Mendorong Perkembangan Industri Lokal dan Ekonomi Kreatif*” Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika, 5(1), 49. <https://doi.org/10.17933/jppi.2015.0501004>

Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Rencana Strategis (RENSTRA) BKPM 2020-2024*

Dadang Sani Septiana, “Tingkat Penggunaan *Gadget* Terhadap Karakter Siswa MTs Nurul Muna Bojong”, Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial humaniora, Vol. 1, 2022, hal. 576, dalam George Crabb, *Universal Technological Dictionary*, (London: Baldwin, Cradock and Joy: 1823), s.v. "technology."

Farid Anfasa, “Percepatan Pelayanan Perizinan Berusaha Dalam Rangka Potensi Peningkatan Investasi Sektor Sumber Daya Alam Pertanian”, Vol. 2 Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *article 17*

Farooqi, Z. uddin, Yaseen, M. R., Anwar, S., & Makhdum, M. S. A., “Determinants of information and communication technology (ICT) adoption in developing countries”, Indian Journal of Science and Technology, 13(39), 4116–4126. <https://doi.org/10.17485/ijst/v13i39.797>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “*Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha*”, (Jakarta: 2018)

Made Suryana Utama, “Potensi Dan Peningkatan Investasi Di Sektor Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Kontribusi Terhadap Perekonomian Di Provinsi Bali”, Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18, 2013

Masyukur Wiratmo Ruttan, “Berbagai Teori Mengenai Perkembangan Teknologi”, Jurnal Siasat Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Vol. 1, 2003, hal. 53-63, dalam Vernon W, “*Uncertainty and Technological Change*”, *The Mosaic of Economic Growth* (ed. Ralph Landau, Timothy Taylor and Gavin Wright), (Stanford: Stanford University Press; Ruttan, Vernon W. 1997)

Nugroho, A., Riswandy, S. R., Widiastiwi, Y., Informatika, P. S., Pembangunan, U., Veteran, N., & Belakang, L., *Teknologi dan Informasi Di Masa Pandemi COVID-19*. Senamika, September

Prayogo, D., & Sukim, *Determinan Daya Beli Masyarakat Indonesia Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020*, Seminar Nasional Official Statistics, 2021(1)

Presentasi Kementerian Investasi, “Penghentian EODB dan Kelanjutan Kemudahan Berusaha di Indonesia”, tanggal 2 November 2021

Syarah Syam Amir, Harsanto Nursadi, et.al, “Implikasi yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Usaha Berbasis

Risiko”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya vol. 2720-9369

Hasil Penelitian:

Desi Novita, “Dampak Investasi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Sumatera Utara”, Tesis, Medan: Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009

Muchsin, “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”, Tesis, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

Lampiran Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021

Website/Internet:

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang”, <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>, diakses tanggal 25 Oktober 2023

ATR/BPN, “*Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang Lebih Berkualitas Melalui Analisis Spasial Otomatis dengan Menggunakan Aplikasi RTR Builder*”, <https://ppsdm.atrbpn.go.id/mod/data/view.php?d=240&rid=22117>, diakses tanggal 25 Oktober 2023

Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Sektor Pertanian di Indonesia”, <https://investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/sektor-pertanian-di-indonesia#:~:text=Jika%20investasi%20di%20sektor%20pertanian,komoditas%20pertanian%20bisa%20terus%20ditingkatkan>, diakses tanggal 25 Oktober 2023

Badan Pemeriksa Keuangan, “Ketidakselarasan Peraturan Hambat Penerbitan Izin Berusaha OSS”, <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=37426>, diakses pada 15 September 2023

Badan Pusat Statistik, “Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Sektor Ekonomi”, <https://www.bps.go.id/indicator/13/1842/2/realisasi-investasi-penanaman-modal-dalam-negeri-menurut-sektor-ekonomi-23-sektor-.html> , diakses pada tanggal 18 November 2023

Bank Dunia, “Bagaimana Mengatasi Ketidakmerataan Akses Internet di Indonesia”, <https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/bagaimana-mengatasi-ketidakmerataan-akses-internet-di-indonesia>, diakses tanggal 25 Oktober 2023

Centre for Public Impact, “Building a Digital Government in Singapore”,

[https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/building-digital-](https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/building-digital-governance-singapore)

[governance-singapore](https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/building-digital-governance-singapore), diakses pada 15 September 2023

Dasgupta, S., Lall, S., & Wheeler, D, Policy reform, economic growth and the

digital divide. Oxford Development Studies, 33(2), 229–243,

<https://doi.org/10.1080/13600810500137889>, diakses tanggal 15

September 2023

Dwi Nur Hayati dan Amalia Purnama Sari, “Kementan Sebut Perppu Cipta Kerja

Permudah Izin Usaha Sektor Pertanian”,

[https://money.kompas.com/read/2023/01/31/141751726/kementan-sebut-](https://money.kompas.com/read/2023/01/31/141751726/kementan-sebut-perppu-cipta-kerja-permudah-izin-usaha-sektor-pertanian?page=all)

[perppu-cipta-kerja-permudah-izin-usaha-sektor-pertanian?page=all](https://money.kompas.com/read/2023/01/31/141751726/kementan-sebut-perppu-cipta-kerja-permudah-izin-usaha-sektor-pertanian?page=all),

diakses tanggal 25 Oktober 2023

Farooqi, Z. uddin, Yaseen, M. R., Anwar, S., & Makhdam, M. S. A.,

“Determinants of information and communication technology (ICT)

adoption in developing countries”, Indian Journal of Science and

Technology, 13(39), 4116–4126. <https://doi.org/10.17485/ijst/v13i39.797>, diakses

tanggal 15 September 2023

Hukum Online, “Pemerintah Targetkan Penyempurnaan Sistem OSS RBA Awal

2022”, [https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-targetkan-](https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-targetkan-penyempurnaan-sistem-oss-rbaawal-2022-lt619ca330a11de?page=all)

[penyempurnaan-sistem-oss-rbaawal-2022-lt619ca330a11de?page=all](https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-targetkan-penyempurnaan-sistem-oss-rbaawal-2022-lt619ca330a11de?page=all),

diakses pada tanggal 25 Oktober 2023

Hadiyanti Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, “Work From Home”,
<https://mediaindonesia.com/opini/298498/work-from-home>, diakses pada
15 September 2023

Kabar 6, “43 Pelaku Usaha di Lebak Kena Sanksi Karena Tak Laporkan LKPM”,
<https://kabar6.com/43-pelaku-usaha-di-lebak-kena-sanksi-karena-tak-lapor-lkpm/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Terhadap Peradilan Tata Usaha Negara”,
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2942:undang-undang-administrasi-pemerintahan-terhadap-peradilan-tata-usaha-negara&catid=103&Itemid=184&lang=en, diakses
pada 15 Agustus 2023

Kementerian Investasi/BKPM, “Ease of Doing Business di Indonesia Terus Membaik”, <https://investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/ease-of-doing-business-di-indonesia-terus-membaik>, diakses pada 15 September 2023

Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Kominfo Lanjutkan Lima Program Prioritas di 2023”,
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/44678/kominfo-lanjutkan-lima-program-prioritas-di-2023/0/artikel>, diakses tanggal 25 Oktober 2023

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Buku Ajar Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia”,

https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/653585/mod_resource/content/3/PERTEMUAN%20KE-13.pdf, diakses pada 15 Agustus 2023

Kementerian Pertanian, “Analisis PDB Sektor Pertanian Tahun 2022”,
https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Analisis_PDB_Sektor_Pertanian_2022.pdf, diakses pada 15 September 2023

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, “*Digitalisasi OSS Berbasis Risiko Masih Bermasalah Antara Pusat dan Daerah*”,
<https://www.kppod.org/berita/view?id=1011>, diakses tanggal 25 Oktober 2023

Kores Kilikily, “Bupati Minta Petani di Aru Miliki Perizinan Berusaha”,
<https://www.tribun-maluku.com/bupati-minta-petani-di-aru-miliki-perizinan-berusaha/09/05/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023

Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., L.L.M. Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, Makalah Lepas,
<http://scrib.com>, diakses pada 15 September 2023

Listhari Baenanda, “Mengenal Lebih Jauh Revolusi Industri 4.0”,
<https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/>, diakses pada 15 September 2023

Mohar Syarif, “Pelaku IKM Mulai Sadar Izin – DPMPTSP Kabupaten Sukabumi Terus Kenalkan OSS”, <https://www.neraca.co.id/article/145018/pelaku-ikm-mulai-sadar-izin-dpmptsp-kabupaten-sukabumi-terus-kenalkan-oss>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023

OSS, “OSS RBA Resmi diluncurkan, Bahlil Siapp Pasang Badan Jika ada Trouble”, <https://pasardana.id/news/2021/8/10/oss-resmidiluncurkan-bahlil-siap-pasang-badan-jika-adatrouble/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023

OSS, “Pedoman Perizinan Berusaha melalui OSS untuk pelaku usaha”, <https://oss.go.id/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, “Penerapan Sistem Online Single Submission Versi 1.1 (OSSv1.1)”, <https://izinusaha.pertanian.go.id/>, diakses pada 15 Agustus 2023

Syahrizal Sidik, “Ini Sederet Alasan Kenapa Investasi 2018 Loyo”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190130161424-17-53101/ini-sederet-alasan-kenapa-investasi-2018-loyo> , diakses pada tanggal 18 Nobember 2023

Ulasan.co, “Penerapan OSS RBA di Kepri Belum Sempurna”, <https://ulasan.co/penerapan-onlinesingle-submission-rba-di-kepri-belumsempurna/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023

Wikipedia, “Kabinet Pembangunan IV”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Pembangunan_IV, diakses pada 25
Oktober 2023

World Bank, “Ease of Doing Business Rankings”,
<https://archive.doingbusiness.org/en/rankings>, diakses 15 Agustus 2023

Yusuf Imam Santoso, “Belum Genap 4 Bulan, OSS RBA sudah terbitkan 470 ribu
NIB”, [Belum genap 4 Bulan, OSS RBA sudah terbitkan 470 ribu NIB](https://www.kontan.co.id)
([kontan.co.id](https://www.kontan.co.id)), diakses pada tanggal 25 Oktober 2023

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Agung Satrio S.M., Bagian Pelayanan Konsultasi
Perizinan Berusaha, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Surabaya, 26 September 2023, Pukul 10.00 WIB